

TATA KELOLA DESA: FAMILISME DAN IMPLIKASINYA DI DESA LEMBANG LOHE, BULUKUMBA

Salman¹, Abu Bakar^{2*}, Anggriani Alamsyah³

ABSTRAK

¹UIN Alauddin Makassar
Jl. HM. Yasin Limpo No. 36,
Gowa, Indonesia
salman0149@gmail.com

²UIN Alauddin Makassar
Jl. HM. Yasin Limpo No. 36,
Gowa, Indonesia
abu.bakar@uin-alauddin.ac.id
(corresponding author)

³UIN Alauddin Makassar
Jl. HM. Yasin Limpo No. 36,
Gowa, Indonesia
naniamsyah@gmail.com

Artikel ini menjelaskan tentang politik familisme di Desa Lembang Lohe, Bulukumba, Sulawesi Selatan dan berusaha menjawab pertanyaan bagaimana bentuk familisme dan apa implikasinya bagi pembangunan Desa Lembang Lohe. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif yang dianalisis dengan menggunakan teori familisme. Artikel ini berkesimpulan bahwa meskipun kekerabatan terjalin cukup kuat dalam struktur pemerintahan Desa Lembang Lohe akan tetapi dampak yang diberikan terhadap pembangunan desa sejauh ini cukup baik dengan dibuktikan pelayanan dan pembangunan yang sudah terealisasi serta adanya keterbukaan aparat desa dalam memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk mendiskusikan dan memutuskan sesuai hasil musyawarah bersama terkait penggunaan dana desa. Poinnya adalah bahwa politik kekerabatan tidak selamanya negatif tergantung kepada pemimpinnya.

Kata kunci: Familisme, politik, pemerintah desa

PENDAHULUAN

Tulisan ini menjelaskan tentang praktik politik familisme di Desa Lembang Lohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Studi tentang familisme atau politik kekerabatan telah banyak dibidik para sarjana di Indonesia, misalnya Dewi Anggraini (2013), Hendi Sanda Putra (2017), Pawennari Hijjang dan Lia Amelia (2019), dan Nurul Farra Yhasmid (2020). Secara umum studi yang ada menunjukkan bahwa struktur jaringan kekerabatan dalam kepemimpinan terutama di tingkat desa berpusat pada kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Untuk itu diperlukan kajian sejauh mana relevansi dari klaim kesarjaan yang ada bahwa kepala desa adalah episentrum dari praktik familisme.

Politik familisme atau politik kekerabatan dalam konteks Indonesia memiliki kecenderungan menggunakan sumber daya kekuasaan baik formal maupun informal. Tidak jarang pola ini banyak dipraktikkan dengan cara menekan aparat yang bekerja dalam institusi pemerintahan, namun pola tersebut pada banyak kasus terbukti ampuh dalam mencapai atau mempertahankan kekuasaan terkhusus di dalam pemerintahan desa. Pada aspek kebijakan, politik kekerabatan biasanya di pengaruhi oleh adanya dominasi kekuasaan sehingga mampu mempengaruhi proses pembuatan kebijakan atau keputusan politik. Di sisi lain mereka sangat mudah mendapatkan kekuasaan ketika mereka bertarung dalam memperebutkan kekuasaan, hal ini dikarenakan akses terhadap modal dan pengaruh keluarga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dalam politik familisme atau politik kekerabatan untuk menjaga hubungan politiknya mereka sering kali melakukan bagi-bagi jabatan untuk melanggengkan kekuasaannya, hal seperti itu sering kali ditemukan baik di skala nasional maupun lokal (Susan, 2017).

Fenomena praktik politik familisme banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia (Anggra & Suryanef, 2022; Upe, Nur, & Suaib, 2022; Mirsa & Imran, 2023; Yhasmid, 2020; Alam, 2018; Pahrudin, 2018; Poma, 2016; Amran, Limba,

& Roslan, 2018. Salah satunya adalah di Desa Lembang Lohe, Bulukumba. Praktik politik kekerabatan yang terjadi yakni adanya dominasi kekerabatan dalam struktur pemerintahan desa. Praktik politik kekerabatan ini tidak menutup kemungkinan memberi dampak negatif pada pengelolaan pemerintahan desa, jika pengangkatan perangkat desa dilakukan hanya karena adanya hubungan keluarga dan tanpa memperhatikan kapasitas yang dimiliki. Tentu hal ini akan mempengaruhi cara pelayanan dan pembangunan yang kurang baik di pemerintahan desa.

Secara umum, praktik politik kekerabatan dapat menutup peluang untuk melahirkan pemimpin yang baik, atau dapat menumbuhkan bentuk baru tirani yang memberi jalan kepada anggota keluarga dalam struktur kekuasaan. Mengisi posisi pemerintahan seringkali bukan merupakan praktik profesional, tetapi keakraban politik merupakan persyaratan yang sangat menentukan untuk mengisi posisi jabatan. Praktik politik kekerabatan juga merupakan bentuk awal dari penyelewengan kekuasaan yang berdampak buruk terhadap tata kelola desa, salah satunya adalah lahirnya korupsi dan nepotisme karena adanya dominasi dalam struktur kekuasaan sehingga dapat melemahkan *check and balance* pada pelaksanaan tugas-tugas dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan.

Fenomena familisme ini juga terjadi dalam pemerintahan Desa Lembang Lohe, dimana para perangkat desa merupakan sanak keluarga atau kerabat dari kepala desa. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyelewengan kekuasaan dalam pemerintahan desa dikarenakan adanya hubungan kekeluargaan yang terjalin antara atasan dengan bawahan. Jaringan kekerabatan yang terjalin dalam pemerintahan Desa Lembang Lohe tentu memberikan dampak positif dan negatif terhadap tata kelola pemerintahan desa.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dalam latar belakang masalah, maka terdapat argumen terkait mengapa dilakukan penelitian di lokasi tersebut antara lain: *pertama*, kuatnya sistem kekerabatan di Desa Lembang Lohe. *Kedua*, Desa Lembang Lohe memiliki karakteristik kepemimpinan yang berbeda dengan desa lain di mana Kepala Desa Lembang Lohe telah menjabat selama lebih dari dua periode. Hal ini menjadi fenomena yang jarang dijumpai, mengingat bahwa Kepala Desa Lembang Lohe masuk dalam daftar kepala desa yang berhasil memenangkan pemilihan selama tiga periode berturut-turut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk familisme dan dampak keberadaan familisme dalam tata kelola pemerintahan Desa Lembang Lohe.

Familisme

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kami menggunakan konsep familisme Adela Garzon sebagaimana dikutip oleh Wasisto Raharjo Djati untuk menguraikan familisme di Desa Lembang Lohe, Bulukumba. Dalam kajian ilmu sosial dan politik, familisme sebagai budaya politik diartikan sebagai ketergantungan yang terlalu besar pada ikatan keluarga, yang melahirkan kebiasaan menempatkan keluarga dan ikatan kekerabatan pada kedudukan yang lebih tinggi dari pada kewajiban sosial lainnya. Dalam pengertian lainnya, familisme juga dipahami sebagai *new friendly request*, yakni dorongan psikologis bagi seseorang untuk dapat berkarir di dalam dua ranah yakni publik sebagai birokrat dan privat sebagai korporat-swasta (Garzon, 2000).

Ada tiga varian familisme (Djati, 2013), yaitu; *Pertama*, familisme. Familisme sebuah dinasti politik yang hanya didasarkan pada kekerabatan langsung (hubungan) dalam keluarga dan ikatan perkawinan (perkawinan) dengan klan lain. Posisi dengan silsilah politik yang kuat menguntungkan bagi mereka yang memiliki silsilah yang lemah.

Kedua, quasi familisme. Model ini didasarkan pada kasih sayang kekeluargaan dan sikap solidaritas dalam struktur kekuasaan. Alih-alih dimaknai sebagai afeksi, afeksi literal dimaknai sebagai bentuk orientasi kebijakan keluarga berdasarkan lokalitas, lingkungan, dan tribalisme, mirip dengan keluarga. Dengan kata lain, dimensi dinasti politik ini bukan lagi ranah keluarga inti, bercabang ke keluarga lain dengan sistem kekerabatan yang dibangun secara artifisial, bukan keturunan darah. Dengan demikian, dalam model semi-keluarga, setiap keluarga berusaha mengidentifikasi dirinya melalui simbol tertentu untuk mendapatkan legitimasi dari anggota keluarga lainnya. Jadi termobilisasi dalam semi-familialisme itu sendiri adalah proses solidaritas anggota formal dan informal. Akibatnya, keluarga setengah berkembang menjadi kekuatan oligarki yang mampu mempengaruhi semua bidang kehidupan.

Ketiga, egoisme-familisme. Model dinasti politik ini didasarkan pada pemenuhan aspek fungsionalisme dibanding hanya menuruti garis keturunan maupun ikatan darah. Konteks egoisme ini dapat dipahami dalam dua hal, yakni dari segi kepala daerah dan masyarakat. Egoisme dari kepala daerah pada dasarnya sama dengan konsepsi teori sebelumnya yakni kecenderungan mendahulukan keluarga dari pada publik dalam pengisian posisi jabatan publik maupun suksesi pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif sendiri merupakan metode dengan pola kontekstual dengan menggunakan manusia sebagai alat dan umumnya disesuaikan dengan situasi rasional dalam mengumpulkan informasi yang bersifat kualitatif (Moleong, 2001). Untuk memperoleh data yang relevan, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun yang diwawancarai adalah masyarakat desa dan Kepala Desa Lembang Lohe.

Adapun langkah-langkah analisis data adalah reduksi data. Ini merupakan suatu bentuk analisis yang digunakan untuk mengklarifikasi, mengklasifikasikan, mengarahkan, dan menghapus data yang tidak perlu dengan mengatur informasi dengan cara ini. Setelah itu membandingkan data tersebut satu sama lain. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (Yusuf, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengkaji Praktik Politik Familisme di Lembang Lohe

Fenomena politik familisme sudah ada sejak masa pra kolonial kemudian dilanjutkan pada masa Orde Baru. Hubungan familisme dengan kekuasaan sudah sejak lama melekat pada kehidupan perpolitikan di Indonesia yang berlangsung secara turun temurun. Pada hakikatnya jaringan kekerabatan dianggap suatu hal yang sangat efektif dalam memperoleh kekuasaan. Untuk memperkuat kekuasaan para oknum tertentu membuat kekuatan yang berasal dari keluarga ataupun kerabat yang dianggap dapat memperkuat pengaruh kekuasaannya. Jadi tidak heran jika para pemimpin menempatkan keluarga atau kerabatnya dalam jabatan-jabatan yang strategis. Tentu hal ini memberikan keuntungan bagi penguasa dalam menjalankan kepentingan pribadi dan kelompoknya, karena adanya dominasi kekerabatan dalam struktur kekuasaan (Siswandani & Prasetyo, 2022).

Fenomena politik familisme yang terjadi di Desa Lembang Lohe dapat dilihat pada aspek rekrutmen perangkat desa. Hampir semua yang direkrut adalah kerabat kepala

desa, sisanya adalah kroni. Pola rekrutmen perangkat desa semacam ini akan berpengaruh pada aspek pelayanan publik di tingkat desa, dikarenakan tidak didasarkan pada profesionalitas dan kapabilitas pegawai. Padahal, aparat desa memiliki tanggung jawab dalam mengelola pembangunan desa yang diharapkan mampu memberi kemajuan terhadap desa. Di bawah ini daftar perangkat desa di Lembang Lohe.

Tabel 1. Perangkat Pemerintahan Desa Lembang Lohe

No.	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Edy Haryono
2	Sekretaris Desa	Muhammad Rijal
3	Kepala Seksi Pemerintahan	Maing
4	Kepala Seksi Kesra dan Pelayanan	Muhammad Arfah
5	KUR Umum dan Perencanaan	Ruhwiyah
6	KUR Keuangan	Muhammad Risman, S.Pd
7	Kepala Dusun Usa	Muhammad Sukri
8	Kepala Dusun Arajang	Muhammad Syahrir
9	Kepala Dusun Tanetea	Supriadi

Sumber: Profil Desa Lembang Lohe, 2022.

Penunjukan perangkat desa sebenarnya dilakukan melalui dua mekanisme yaitu melalui penunjukan langsung oleh kepala desa dan mengikuti tahapan tes seleksi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten. Sebagaimana pernyataan Fadil bahwa:

“Untuk tahun 2020 kemarin proses pengangkatan perangkat desa itu dilakukan dengan cara melalui penjurangan atau mengikuti tes seleksi, berbeda untuk tahun-tahun kemarin atau di dua periode sebelumnya itu lakukan secara tertutup atau di tunjuk secara langsung oleh kepala desa.” (Fadil, 2022).

Informasi di atas menunjukkan bahwa mekanisme dalam pengangkatan kepala desa itu dilakukan dengan proses tes seleksi atau penjurangan, akan tetapi mekanisme ini baru berlaku setelah masuk di masa kepemimpinan 3 (tiga) periode kepala desa Lembang Lohe. Sebelumnya dilakukan dengan cara penunjukan langsung oleh kepala desa. Hal tersebut dibenarkan oleh Edy Haryono, kepala desa Lembang Lohe:

“Memang aturan ini baru berlaku setelah terbitnya aturan baru dari pemerintah kabupaten, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya pengangkatan perangkat desa sebelumnya saya lakukan secara langsung atau di tunjuk. Akan tetapi dalam pengangkatan perangkat desa, saya selalu mengedepankan kapasitas yang dimiliki sekalipun itu dari kerabat saya yang terpilih.” (Haryono, 2022)

Iswandi Baddu, salah satu tokoh masyarakat di Desa Lembang Lohe menerangkan bahwa yang mengisi jabatan perangkat desa di Lembang Lohe masih diisi oleh orang-orang yang dekat dengan kepala desa. Pada pemilihan perangkat desa mulai periode

pertama sampai periode keduanya masih dipegang oleh kerabat kepala desa, karena memang prosesnya masih ditunjuk langsung oleh kepala desa (Baddu, 2022).

Bentuk Familisme dalam Pemerintahan Desa Lembang Lohe

Politik kekerabatan sangat berperan penting khususnya dalam penentuan rekan kerja di pemerintahan Desa Lembang Lohe. Kepala Desa Lembang Lohe menempatkan sanak keluarganya dalam jabatan perangkat desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya 8 (delapan) orang perangkat desa yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Edy Haryono. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Bentuk Familisme di Desa Lembang Lohe

No.	Nama	Hubungan Kepala Desa	Jabatan
1	Muhammad Rijal	Sepupu	Sekertaris Desa
2	Maing	Kroni	Kepala Seksi Pemerintahan
3	Muhammad Arfah	Supupu	Kepala Seksi Kesra dan Keuangan
4	Ruhwiyah	Sepupu dari istri	KUR Umum dan Perencanaan
5	Muhammad Risman	Ponakan	KUR Keuangan
6	Muhammad Sukri	Saudara kandung	Kepala Dusun Usa
7	Muhammad Syahrir	Sepupu	Kepala Dusun Arajang
8	Supriadi	Kroni	Kepala Dusun Tanetea

Sumber: Diolah Dari Data Primer, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kepemimpinan Edy Haryono selaku kepala Desa Lembang Lohe tidak terlepas dari unsur kekerabatan, dimana para perangkat desa memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala Desa Lembang Lohe. Seperti yang diutarakan oleh Muhammad Sukri selaku kepala Dusun Usa Desa Lembang Lohe:

“Awalnya karena adanya kekosongan jabatan kepala Dusun Usa, kemudian ada dorongan dari kepala desa dan keluarga untuk jadi kepala Dusun Usa pada periode ke 2 (kedua) atau pada tahun 2014, yang pada saat itu saya di tunjuk langsung oleh kepala desa. Kemudian di periode 3 (ketiga) pak desa, kembali di lakukan pemilihan perangkat desa pada tahun 2020. Akan tetapi sistem pemilihan kepala desa sudah berbeda dengan tahun sebelumnya karena proses pemilihan perangkat desa dilakukan dengan cara tes seleksi atau melalui penjurangan, akan tetapi pada saat pendaftaran calon kepala Dusun Usa yang mendaftar hanya saya sendiri dan secara tidak langsung saya terpilih kembali menjadi kepala Dusun Usa.” (Sukri, 2022).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala Dusun Usa diperoleh informasi bahwa Muhammad Sukri terpilih menjadi kepala Dusun Usa karena diminta langsung oleh Edy Haryono selaku kepala Desa Lembang Lohe pada tahun 2014 atau di masa periode ke 2 (kedua) kepala desa, yang pada saat itu sistem pemilihan perangkat desa masih dilakukan dengan cara ditunjuk langsung oleh kepala Desa Lembang Lohe. Hal serupa juga di utarakan oleh Edy Haryono selaku kepala Desa Lembang Lohe yang mengatakan:

“Pada saat saya menjabat di periode pertama dan kedua sistem pengangkatan perangkat desa saya lakukan dengan menunjuk langsung.

Oleh karena itu, otomatis yang saya pilih adalah kerabat-kerabat saya yang telah mendukung saya saat pemilihan kepala desa, akan tetapi saya selalu mengedepankan kualitas yang dimiliki sekalipun itu kerabat saya. Kan tidak enak jika yang diangkat adalah orang tidak sejalan dengan kita. Olehnya itu saya memilih kerabat saya dengan tujuan menciptakan keharmonisan dalam ruang kerja pemerintahan desa. Akan tetapi pada periode ketiga saya ada perubahan dalam sistem pengangkatan perangkat desa yakni melalui tes seleksi atau penjurangan sesuai dengan aturan pemerintah kabupaten.” (Haryono, 2022).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengangkatan perangkat desa di Desa Lembang Lohe yaitu dilakukan dengan menunjuk langsung kerabatnya dalam pengisian jabatan perangkat desa yang dianggap memiliki kapasitas. Kepala desa Lembang Lohe secara tidak langsung hanya mempercayai kerabatnya dalam pengisian jabatan perangkat desa, dengan tujuan untuk menciptakan rasa kekeluargaan dalam bekerja. Hubungan kekeluargaan yang terjalin menjamin dukungan penuh terhadap kebijakan kepala desa. Edy Haryono sendiri merupakan sosok yang disegani oleh bawahannya dan masyarakat karena begitu berpengaruh di Desa Lembang Lohe, khususnya Dusun Usa.

“Pada dasarnya saya adalah seorang peternak yang mempunyai kelompok ternak dengan saya sendiri sebagai ketua kelompok tersebut. Kemudian saya diangkat sebagai sekertaris desa selama 3 (tiga) tahun, setelah menjabat sebagai sekertaris desa kemudian saya ditunjuk oleh kepala desa terpilih pada saat itu sebagai kepala Dusun Usa, saya menjabat selama 12 (dua belas) tahun, setelah itu pada tahun 2008 karena dorongan masyarakat saya berani mencalonkan diri sebagai kepala desa dan alhamdulillah terpilih.” (Haryono, 2022).

Berdasarkan data di atas dapat dianalisis bahwa politik familisme yang terjadi di Desa Lembang Lohe terlihat cukup kuat khususnya dalam pengisian jabatan perangkat desa masih berdasarkan unsur kekerabatan. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Djati bahwa konsep familisme pada dasarnya, kecenderungan untuk memprioritaskan anggota keluarga dibanding publik dalam pengisian suksesi pemerintahan. Fenomena politik familisme di atas termasuk dalam tipologi familisme yang pertama yaitu *familism* yang dimana teori ini menjelaskan tentang politik familisme yang didasarkan secara murni pada hubungan darah langsung dalam keluarga (*consanguinity*) dan hubungan perkawinan (*marriage*) (Djati, 2013).

Pada femonema familisme yang terjadi di Desa Lembang Lohe terdapat kecenderungan lain yang mengedepankan asas fungsional yang dilakukan kepala desa dalam merekrut kerabatnya dalam jabatan perangkat desa. Hal ini juga berkaitan dengan teori yang dikemukakan Djati dalam bentuk familisme yang ketiga yaitu egoisme-familisme, model dinasti politik ini didasarkan pada pemenuhan aspek fungsionalisme dan tidak semata-mata mengejar silsilah dan kekerabatan. Hal ini dibuktikan jabatan sekretaris desa diisi oleh kerabat kepala desa yang memiliki kapasitas dalam mengelola administrasi desa (Djati, 2013).

Asal-Usul Politik Familisme dalam Pemerintahan Desa Lembang Lohe

Berdasarkan hasil temuan di atas bahwa politik familisme atau politik kekerabatan yang terjadi di Desa Lembang Lohe cukup terbilang kuat, hal ini dibuktikan adanya

dominasi satu kerabat dalam birokrasi pemerintahan desa. Terlepas dari itu ada beberapa faktor yang mendasari terjadinya politik kekerabatan dalam pemerintahan desa.

Adapun faktor yang mendasari terjadinya politik familisme atau politik kekerabatan di Desa Lembang Lohe yaitu:

Pertama, modal sosial. Jaringan kekerabatan yang dimiliki kepala desa terbilang cukup luas baik dari dalam daerahnya maupun yang diluar daerah, hal ini di gunakan untuk memperoleh kekuasaan. Aktor-aktor yang berada dalam jaringan kekerabatan juga turut mendapatkan keuntungan dari relasi kekerabatan salah satunya yaitu mendapatkan jabatan sebagai perangkat desa. Tingginya rasa solidaritas kekerabatan di Desa Lembang Lohe membuat modal sosial yang ada terjaga dengan baik.

Kedua, partisipasi. Jaringan keluarga yang dimiliki Kepala Desa Lembang Lohe akan dapat mencapai tujuan apabila para kerabatnya mampu berpartisipasi dengan baik seperti pada saat menjelang pilkades. Kepala Desa Lembang Lohe dalam memenangkan pilkades selama tiga periode tidak terlepas dari partisipasi jaringan kerabat yang dimiliki. Partisipasi kerabat sangat penting untuk mencapai kepentingan bersama.

Ketiga, resiprositas. Keterkaitan antar pemangku kepentingan. Adapun resiprositas yang terdapat dalam pemerintahan Desa Lembang Lohe yaitu pada saat pemilihan kepala desa meminta para kerabatnya untuk mendukungnya, setelah terpilih menjadi kepala desa kemudian menempatkan kerabatnya dalam jabatan perangkat desa.

Keempat, kepercayaan. Berdasarkan perasaan yang lebih mempercayai kerabat dari pada non-kerabat dengan tujuan kepala desa ingin menciptakan solidaritas yang tinggi serta keharmonisan dalam ruang kerja pemerintahan desa.

Implikasi Politik Familisme Pada Tata Kelola Pemerintahan Desa

Adanya ikatan kekerabatan dalam pemerintahan Desa Lembang Lohe menimbulkan solidaritas yang tinggi dan memperkuat hubungan kekeluargaan dalam lingkungan kerja pemerintahan desa. Aparat desa lebih memilih untuk menjaga hubungan kekeluargaan untuk menghindari semaksimal mungkin perselisihan dan hal-hal yang menimbulkan konflik, terutama di lingkungan kerja pemerintah desa. Selain memperkuat solidaritas, hubungan kekerabatan juga memunculkan rasa tidak enak dalam setiap diri perangkat desa. Sisi positif adanya rasa tidak enak yaitu dapat meminimalisir terjadinya konflik di lingkungan kerja pemerintah desa. Sisi negatifnya, jika lingkungan kerja pemerintah desa memiliki kekerabatan, justru melemahkan kontrol satu sama lain. Kepala desa akan menjadi pusat pengaruh dan bawahan hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh kepala desa. Di sisi lain, familisme semacam ini akan membuka ruang yang lebar terjadinya kongkalikong dan sulit mendeteksi penyelewengan anggaran desa di dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Seperti yang diutarakan oleh Muh. Sukri salah satu warga Dusun Arajang yang mengatakan:

“Menurut pandangan saya, sebenarnya yang menjadi kegelisahan saya selaku warga desa disini yaitu ditakutkan ketika terjadi tindakan korupsi atau kesalahan kepala desa itu tidak terbuka karena yang menjabat menjadi perangkat desa adalah orang-orang beliau (kepala desa) sehingga nanti ketika ada penyalahgunaan anggaran susah untuk terbuka.” (Sukri M. , 2022)

Berbeda dengan Muh. Sukri, Iswandi salah seorang warga Dusun Tanetea di Desa Lembang Lohe mengatakan:

“Kalo soal pelayanan yang dilakukan aparat desa disini menurut saya lumayan bagus berbeda dengan periode pertama pak desa pelayanan masih kurang baik artinya masih kacaulah serta pembangunan juga belum berjalan. Sehingga masyarakat disini banyak yang mengeluh jika ada yang ingin di urus di kantor desa. Tapi pas pemilihan perangkat desa baru pelayanan desa sudah ada perubahan, contohnya pengurusan administrasi sudah lumayan bagus dan alhamdulillah di periode sekarang ini sudah cukup baik sudah banyak pembangunan fisik yang telah terbangun.” (Iswandi, 2022).

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisa bahwa pembangunan dan pelayanan aparat desa di Desa Lembang Lohe terlihat cukup baik, dengan dibuktikan adanya beberapa pembangunan yang dilakukan. Seperti pelayanan administrasi kepada masyarakat desa sudah berjalan baik atau sudah memadai dan pembangunan yang dilakukan baik yang bersifat fisik maupun non fisik sudah ada beberapa yang terlaksana. Akan tetapi hal ini baru terlaksana pada masa periode kedua kepala desa, sebelumnya pelayanan dan pembangunan desa kurang baik atau belum memadai sehingga banyak masyarakat yang mengeluh terkait kinerja aparat desa. Hal yang serupa juga di kemukakan oleh Rahmi selaku waga Dusun Usa di Desa Lembang Lohe yang mengatakan:

“Iya memang dulu itu pada periode pertama pelayanan aparat desa kurang baik masih banyak kekurangan karena masih ada beberapa perangkat desa yang kurang paham tentang penyelenggaraan administrasi desa dan kedisiplinan juga pada saat itu sangat kurang baik, banyak perangkat desa yang pada saat hari kerja kurang yang masuk kantor. Akan tetapi pada periode keduanya sudah lumayan baik terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat karena memang pada periode kedua pak desa ada beberapa perangkat desa yang diganti salah satunya sekretaris desa, nah sekdes baru ini tak lain dari keluarga dari kepala desa. Sebenarnya dia bukan asli orang desa disini tapi dari desa luar, akan tetapi kinerjanya sangat bagus contohnya urusan administrasi sangat paham karena dia pintar main komputer.” (Rahmi, 2022).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan dan pembangunan di masa periode pertama kepala desa belum efektif atau kurang tertib. Hal ini di karenakan aparat desa yang tergabung masih banyak yang kurang paham terkait pelaksanaan tugas aparat desa. Akan tetapi ketika memasuki periode kedua, kepala desa melakukan pergantian beberapa jabatan perangkat desa seperti sekretaris desa yang dianggap lebih berkompeten. Aparat desa memberikan hal positif terhadap pembangunan dan pelayanan publik yang mulai terlihat tertib dan efektif. Selanjutnya, pernyataan Edy Haryono selaku kepala desa di Desa Lembang Lohe yang mengatakan:

“Pada tahun 2008-2016 pembangunan memang lambat belum sesuai harapan masyarakat di sini, karena pada saat itu pembangunan yang saya prioritaskan adalah kantor desa dan masih kurang pembangunan yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Akan tetapi di periode kedua saya alhamdulillah pembangunan mulai berjalan dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat dalam rapat musyawarah pembangunan desa untuk memberikan ide dan gagasannya terkait rencana prioritas pembangunan yang dilakukan. Sekarang itu sistem

yang kami jalankan sudah berbeda, jadi apa-apa yang ingin kita kerjakan harus melibatkan masyarakat seperti BPD, PKK, toko pemuda, toko agama, kepala dusun dan RT RW. Lagi-lagi disini kami aparat desa mencari solusi bagaimana baiknya untuk pembangunan desa disini. Kalo untuk pembangunan yang sudah saya kerjakan selama saya menjabat sampai saat ini bisa dibilang sudah lumayan banyak yang terealisasi, seperti jalan tani, irigasi, lapangan olahraga, pengadaan bibit unggul, renovasi puskesmas dan pembangunan kandang sapi untuk BUMDes, akan tetapi semenjak adanya covid-19 anggaran dana desa kurang masuk di dana pembangunan, pembagiannya sudah semua sudah diatur oleh pemerintah pusat aseperti BLT, ketahanan pangan dan penanggulangan covid.” (Haryono, 2022).

Hal senada juga disampaikan oleh Hamsin selaku Ketua BPD di Desa Lembang Lohe yang mengatakan:

“Memang betul pembangunan fisik dan non fisik disini sudah mulai berjalan dengan baik dari mulai masuknya periode kedua kepala desa sampai sekarang pembangunan terus berjalan. Memang semenjak hadirnya covid-19 pembangunan mulai lagi melambat karena dana desa di alihkan sebagian besar ke BLT dan penanggulangan covid sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat kemarin.” (Hamsin, 2022).

Dari hasil wawancara secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dampak keberadaan familisme terhadap pembangunan desa di Lembang Lohe memberi hal positif terhadap pembangunan desa, hal ini dibuktikan adanya pembangunan fisik dan non fisik sudah berjalan dengan baik seperti pembangunan jalan usaha tani, irigasi, lapangan bola, pengadaan bibit unggul, renovasi puskesmas dan kantor desa. Meskipun pada awal periode aparat desa masih belum efektif kinerja yang diberikan seperti pelayanan publik yang belum memadai dan pembangunan yang masih lambat.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini telah menjawab pertanyaan terkait sejauh mana kuatnya sistem kekerabatan di Desa Lembang Lohe dan bagaimana karakteristik kepemimpinan dalam pemerintahan di Desa Lembang Lohe. Dari uraian dan penjelasan yang sudah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena politik familisme yang terjadi di Desa Lembang Lohe berawal dari pengangkatan perangkat desa yang dilakukan secara sepihak oleh kepala desa. Hal ini dibuktikan sebanyak 8 orang perangkat desa merupakan keluarga atau kerabat kepala desa. Sistem familisme semacam ini akan menimbulkan kecurigaan dari masyarakat, terutama terkait penggunaan anggaran desa yang begitu besar. Meskipun kekerabatan terjalin cukup kuat dalam struktur Desa Lembang Lohe akan tetapi dampak yang diberikan terhadap pembangunan desa sejauh ini cukup baik dengan dibuktikan pelayanan dan pembangunan yang sudah terealisasi serta adanya keterbukaan aparat desa dalam memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk mendiskusikan dan memutuskan sesuai hasil musyawarah bersama terkait penggunaan dana desa. Oleh karena itu peneliti berasumsi bahwa politik kekerabatan tidak selamanya negatif tergantung kepada pemimpinnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, R. H. (2018). Ikatan Kekeabatan dan Kedamaian Umat Beragama: Studi Kasus di Desa kertajaya Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Penamas, Vol. 31, No. 2*, 379–396.
- Amran, Limba, R. S., & Roslan, S. (2018). Dampak Pemilihan Kepala Daerah terhadap Hubungan Kekeabatan (Studi di Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana). *Neo Societal; Vol. 3, No. 1*, 261-267.
- Anggriani, D. (2013). Politik Kekeabatan. *Jurnal Politik Profetik, Vol. 1 No.2*, 1-8.djati
- Anggra, B. N., & Suryanef, S. (2022). Politik Kekeabatan dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Tanjung Pauh Mudik. *Perspektif, Vol. 11, No. 3*, 1230–1241.
- Djati, W. R. (2013). Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal. *Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol 18, No 2*, 209-211.
- Fadil. (2022, April 25). Sekretaris Karangtaruna Desa Lembang Lohe. (Salman, Interviewer)
- Garzon, A. (2000). Cultural Change And Familism. *Psicotema, Vol.12*.
- Hijang, P., & Amelia, L. (2019). Assajingeng: Politik Kekeabatan di Pilkada Kabupaten Bone (Analisis Antropologi Politik). *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, Vol. 6, No. 2*, 121-134.
- Mirsa, S. M., & Imran, M. (2023). Politik Kekeabatan Desa Barakkae Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. *JSSHA ADPERTISI JOURNAL, Vol. 2, No. 2* , 29–43.
- Moleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Pahrudin. (2018). Dinasti Politik Pemerintah Desa di Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Arajang, Vol. 1, No. 1*, 36-44.
- Poma, M. D. (2016). Responsivitas Aparat dalam pelayanan Administratif Kependudukan Desa Haya-Haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, Vol. 3, No. 1*, 1-10.
- Putra, H. S. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik Muda, Vol.6, No. 2*, 110-119.
- Siswandani, D., & Prasetyo, K. B. (2022). Kuasa Jejaring Kerabat dalam Praktik Politik Lokal Pedesaan (Kajian Antroologi Politik). *Umbara: Indonesian Journal of Anthropology, Vol. 7, No. 1*, 50-60.
- Susan, M. H. (2017). Dinasti Politik dalam Pilkada Indonesia. *Jurnal Of Goverment and Civil Society, Vol. 1 No. 2,*, 111-119.
- Upe, A., Nur, M. J., & Suaib, E. (2022). Kontestasi Politik Kekeabatan dalam Pemilihan Kepala Desa: Konteks Masyarakat Bugis. *Indonesian Annual Conference Series:*

1st Conference on Social, Politics, and Culture (hal. 104-108). Kendari: IACS-CSPC.

Yhasmid, N. F. (2020). Sistem Kekerabatan dan Literasi Politik Terhadap Kepemimpinan Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Patampanua. *DECISION : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, 111-120.

Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.